

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.P. Parlindungan, 1993, *Komentor Atas Undang – Undang Pokok Agraria*, Bandung, Mandar Maju.
- Adrian Sutedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia – Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah dan Nasional*, Edisi 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Eman Ramelan, 2000, *Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999*, Surabaya: Majalah Yuridika.
- Kurnia Warman, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik*, Yogya karta: INSISTPress,
- Martin Darus Badrulzaman, 1997, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: PT. Alumni.
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosiswono, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejono, 2003, *Prosedur Pendaftaran Tanah*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zahirin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok – Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

## **C. Website**

1. <http://www.pasamanbaratkab.go.id/pasbar-daerah-tertinggal-ekonomi-lemah>
2. [Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional > Layanan Publik > Program > Reformasi Birokrasi](#)